

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amirrudin, & Asikin, H. Z. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Grafindo Persada.
- Asikin, Z. (1993). *Dasar Dasar Hukum Perburuhan*. Raja Grafindo Persada. Atok, A. R. Al. (2016). *Negara Hukum Indonesia*. Universitas Negeri Malang.
- Azikin, Z. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Alumni.
- Budiono, A. R. (2009). *Hukum Perburuhan*. Raja Grafindo Persada.
- Djumhana, M. (2023). *Hukum Ketenagakerjaan*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Djumialdji, F. X. (2005). *Perjanjian Kerja*. Sinar Grafika.
- Emzir. (2011). *Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif dan Kuantitatif*. PT Rajagrafindo Persada.
- Ginting, J. (2007). *Hukum Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007)*. Citra Aditya Bakti.
- Harahap, A. M. (2020). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Literasi Nusantara.
- Hardjoprajitno, P., Badrun, S. M., & Wahyuningsih, T. (2020). *Hukum Ketenagakerjaan*. PT Gramedia.
- Husni, M., & Siregar, T. R. (2000). *Perhiasan Tradisional Indonesia*. Direktorat Jenderal Kebudayaan.
- Khakim, A. (2009). *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia* (3rd ed., Vol. 1). Citra Aditya Bakti.
- Khakim, A. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia* (Revisi). Citra Aditya Bakti.
- Nugroho, D. (2020). *Serikat Pekerja dan Perjuangan Hak Buruh*. LP3ES.
- Radbruch, G. (1932). *Rechtsphilosophie*. Verlag von Quelle & Meyer.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Rawls, J. (2005). *A Theory of Justice*. Harvard University Press.
- Satrio, J. (2002). *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*. Citra Aditya Bakti.
- Sirajuddin, W. (2015). *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. Setara Press.

- Soedarjadi. (2008). *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia : Panduan Bagi Pengusaha, Pekerja dan Calon Pekerja*. Buku Kita.
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali.
- Soemitro, R. H. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia.
- Suwiryo, B. (2017). *Hukum Ketenagakerjaan*. LaksBang Pressindo.
- Syahrani, R. (1999). *Rangkaian Intisari Ilmu Hukum*. Penerbit Citra Aditya Bakti.
- Tjandra, L. (2023). *Keadilan Sosial dan Perlindungan Buruh di Indonesia*. Gramedia.
- Ujan, A. A. (2009). *Membangun Hukum, Membela Keadilan*. Kanisius.
- Uwiyono, A., Hosein, S. H., & WidodoSuryadono, M. K. (2018). Asas-Asas Hukum Perburuhan. In *Edisi Ke Dua Cet ke* (2nd ed., Vol. 3). Rajawali Pers.
- Wahyuningsih, S. E. (2022). *Peradilan Hubungan Industrial di Indonesia*. FH UII Press.
- Widodo, J. (2023b). *Pasar Tenaga Kerja dan Ketidakpastian Hukum*. Yayasan Obor.
- Wijayanti, A. (2010b). *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Sinar Grafika.
- Yadiman. (2019). *Metode Penelitian Hukum*. Lekkass.

Undang-Undang atau Peraturan Terkait

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6846.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6671.

Jurnal/Web

Andersen, S. (2022). Flexicurity in Denmark: A Model for Labor Market Reform? *European Journal of Industrial Relations*, 20(2), 121.

Badan Pusat Statistik Kota Bandung. (2023). *Profil Ketenagakerjaan Kota Bandung 2023*.

Bappeda Kota Bandung. (2023). *Laporan Evaluasi Indikator Sosial Kota Bandung Tahun 2023*.

Hernawan, A. (2014). Industrial Relations in the Perspective of Justice Theory by John Rawls. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 26(2), 275–284. <https://doi.org/10.22146/jmh.16042>

Ilyas. (2012). Keabsahan Perjanjian Asuransi Melalui Telemarketing Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 14(2), 201–215.

Jalil, M. F. A., & Fatriani, F. (2025). PHK Sepihak: Prosedur, Hak Pekerja, dan Penyelesaiannya Secara Hukum. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 402–410.

Khairani, R. (2022). *Pengaruh Dividend Payout Ratio, Debt To Equity Ratio, Dan Tingkat Inflasi Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Sub Sektor Kimia Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2021* [Doctoral Dissertation]. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia.

- Khairunnisa, N. N., Tohadi, Maulana, S., Zanaya, K. P., Kholilurahman, D., & Kilikily, R. D. M. M. (2025). Efektivitas Peranan Serikat Pekerja Dalam Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Malahayati*, 6(1), 21–32. <https://doi.org/10.33024/jhm.v6i1.19081>
- Khoe, F. N. (2013). Hak Pekerja yang Sudah Bekerja Namun Belum Menandatangani Perjanjian Kerja Atas Upah Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. *Calyptra*, 2(1), 1–12.
- Komnas Perempuan. (2023). CATAHU 2023: Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan di Dunia Kerja. *Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan*.
- KSPI. (2024, March 12). *Dampak Cipta Kerja terhadap Gugatan PHK di PHI*. KSPI. <http://www.kspi.or.id/>
- Laila, E. (2020). Implementasi Kebebasan Berserikat dalam Hubungan Industrial di Indonesia. *Lex Jurnalica*.
- Latip, A., Lu'luaily, L., & Ainiyah, A. (2019). Mediasi Sebagai Penyelesaian Permasalahan Tenaga Kerja di Kabupaten Bangkalan. *Competence : Journal of Management Studies*, 12(2). <https://doi.org/10.21107/kompetensi.v12i2.4950>
- Mahalli, K. (2015). Negara Kesejahteraan dalam Konteks Pembangunan Wilayah. *Jurnal Ekonom*, 18(1), 38–48.
- Manurung, M. (2018). Peer Review dan Similarity: Menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Perundingan Bipartit. *Jurnal Pionir*, 2(4).
- Manusu, A. G. V., Sumbu, T., & Pinangkaan, N. (2025). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Pekerja Harian Tetap Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. *LEX PRIVATUM*, 15(5).
- Marzuki, P. M. (2008). Karakteristik Ilmu Hukum. *Jurnal Media YURIDIKA*, 23(2).
- Muhtarom, M. (2014). Asas-asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak. *Jurnal Suhuf*, 26(1), 48–56.
- Nurdin, R. (2024). Analisis Akses Hukum Pekerja dalam Sengketa PHK. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 30(1), 150.
- Nururrohim, T. S., Warka, M., & Zeinuddin, M. (2024). Perlindungan Hukum Pekerja Yang Di Phk (Pemutusan Hubungan Kerja) Pada Pasca Undang Undang Cipta Kerja. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 4(3), 1263–1272.

- Prayitno, S. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja yang Terkena PHK Pasca Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 94/PUU-XXI/2023. *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional*, 6(3), 162–171.
- Rahardjo, S. (2005). Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan. *Jurnal Hukum Progresif*, 1(1), 1–24.
- Rosidah. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Pekerja dalam UU Cipta Kerja; Antara Harapan dan Tantangan. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 53(1).
- Situmorang, R. (2013). Tinjauan Yuridis Tentang Perjanjian Kerja Bersama Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. *Lex Privatum*, 1(1), 115–122.
- Subekti, I. (2010). Earnings Management, Value Relevance Of Earnings and Book Value of Equity. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 14(2).
- Subijanto, S. (2011). Peran Negara dalam Hubungan Tenaga Kerja di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 17(6), 705–718.
- Supriyanto. (2023). Strategi Penguatan Peran Pemerintah dalam Penyelesaian PHK. *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 12(2), 244.
- Wibowo, R. F., & Herawati, R. (2021). Perlindungan Bagi Pekerja Atas Tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Secara Sepihak. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1), 109–120. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.109-120>
- Widodo. (2023). Efektivitas Perundingan Bipartit dalam Sengketa PHK. *Jurnal Arena Hukum*, 16(2), 220.
- Wijayanti. (2010). Analisis Kinerja Keuangan dan Harga Saham Perbankan di Bursa Efek Indonesia (Bei). *Journal of Indonesian Applied Economics*, 4(1), 37900.